

**MODAL SOSIAL KOMUNITAS DALAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN DI
DAERAH PASCA KONFLIK KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nurul Fitriani Panjili
NPP. 30.1248

*Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
nurulfpanjili@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Akhmad Marzuki, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background(GAP): Poso District is one of the post-conflict areas in Indonesia. Post-conflict regional recovery is the main problem in the rebuilding effort from the perspective of religion, social and economy as well as culture and politics. **Purpose:** This study aims to understand things that need to be considered in post-conflict regional development are not only limited to policies made by the government to become guidelines in implementing sustainable development. **Method:** This thesis used a descriptive qualitative method using an inductive approach based on empirical facts at the research location. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** The result from this study, public anticipation of the possibility of a return to conflict must also be considered because it is still a vulnerable conflict situation. **Conclusion:** From the results of this study, indicate that the urgency of community social capital, in this case the Mosintuwu Institute, has succeeded in producing economically, socially and politically empowered and independent women through its programs, especially women in rural areas and post-conflict areas in Poso District.

Keywords: Mosintuwu Institute, post-conflict, social capital, women's empowerment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah pasca konflik di Indonesia. Pemulihan daerah pasca konflik menjadi permasalahan utama dalam upaya pembangunan kembali yang ditinjau dari perspektif agama, sosial, dan ekonomi serta budaya dan politiknya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah pasca konflik bukan hanya sebatas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif berdasarkan dari fakta-fakta empirik di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antisipasi publik terhadap kemungkinan terjadinya kembali konflik juga harus diperhatikan karena masih dalam situasi konflik yang rentan. **Kesimpulan:** Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa urgensi modal sosial komunitas dalam hal ini Institut Mosintuwu berhasil mencetak perempuan berdaya dan mandiri secara ekonomi, sosial dan politik melalui program-programnya khususnya perempuan yang ada di wilayah pedesaan dan merupakan daerah pasca konflik di Kabupaten Poso.

Kata Kunci: pemberdayaan perempuan, modal sosial, pasca konflik, Institut Mosintuwu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, terdapat banyak daerah-daerah pasca konflik horizontal. Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah pasca konflik di Indonesia. Hal ini menjadikan Kabupaten Poso memiliki permasalahan dalam upaya pembangunan kembali dilihat dari perspektif agama, sosial, dan ekonomi, serta budaya politiknya. Menurut Lian Gogali dalam bukunya “Konflik Poso : Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan”, kehidupan masyarakat di Poso berubah drastis sejak peristiwa konflik di Poso terjadi pada bulan Desember 1998 yang menjadi awal perubahan tatanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Poso. Semua orang tanpa terkecuali, terpaksa masuk dalam lingkaran konflik komunal yang berkepanjangan.

Daerah pasca konflik di Indonesia tidak mudah untuk melakukan pembangunan kembali, karena di sisi lain daerah pasca konflik berusaha untuk memperbaiki tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Menurut Trijono (2007), bahwa upaya membangun kembali masyarakat pasca konflik dilakukan dengan mendorong proses perdamaian berkelanjutan (rekonsiliasi) dan menentukan pendekatan konflik berbasis perdamaian. Namun menurut Trijono, bahwa berbagai upaya rekonsiliasi konflik yang dilakukan selama ini cenderung bersifat *top down*, dengan sarana yang minim dan kebijakan yang belum sistematis, sehingga dianggap belum sepenuhnya menyentuh akar konflik serta dampak sosial pasca konflik.

Rekonsiliasi konflik di Kabupaten Poso secara garis besar menemui kegagalan serius, setidaknya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu, keterikatan masyarakat pada kondisi masa lalu dan kekhawatiran masyarakat pada kondisi sosial masa kini yang mengancam perdamaian (Nutfu et al., 2016). Rekonsiliasi masyarakat pasca konflik dapat dilakukan melalui penguatan modal sosial (*social capital*) yang dimulai dari membangun modal sosial utama yakni kepercayaan (*trust*) antar masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan mencerminkan demokrasi, karena melibatkan peran serta masyarakat tanpa terkecuali. Model pemberdayaan partisipatif melibatkan peran serta dari masyarakat dalam melakukan pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam hal ini tidak lagi menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Partisipasi dari masyarakat akan menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah yang dalam hal ini berperan sebagai fasilitator dan penyedia dana serta inovasi sehingga masyarakat dapat mendukung program kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di suatu daerah. Kepercayaan (*trust*) yang muncul dalam masyarakat akan mendukung komponen modal sosial dalam melakukan pembangunan berbasis kepercayaan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dimulai dari lingkup kecil, seperti halnya pemberdayaan perempuan. Partisipasi kaum perempuan dalam hal pembangunan, kesejahteraan keluarga, dan usaha perdamaian berasal dari dukungan dan peran aktif perempuan dalam masyarakat. Prinsip kesetaraan gender dewasa ini banyak digaungkan oleh berbagai pihak. Perempuan dan laki-laki dianggap memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, perempuan tidak lagi menjadi kelompok minoritas dan suaranya mulai didengarkan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan perempuan mengakibatkan banyak perempuan yang tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Padahal, perempuan memiliki fungsi yang strategis dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan perempuan merupakan unsur pendukung untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan akan mendorong

proses pembangunan yang optimal.

Komunitas masyarakat daerah menjadi salah satu instrumen strategis dalam proses rekonsiliasi yang dapat dilakukan oleh pemuda daerah seperti halnya Institut Mosintuwu di Kabupaten Poso. Institut Mosintuwu merupakan institusi perempuan yang mana pendirinya merupakan survivor konflik Poso, dan memiliki tujuan menyuarkan hak-hak masyarakat yang dirampas melalui konflik kedaerahan. Institut Mosintuwu sebagai lembaga swadaya masyarakat mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Poso terlebih dalam sektor pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terhadap Modal Sosial Komunitas dalam Pemberdayaan Perempuan merupakan pedoman penulis untuk turut melaksanakan analisis seperti demikian di daerah pasca konflik Kabupaten Poso. Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Pertama, Maryanti Babutung (2018) dengan judul Peran Institut Mosintuwu Dalam Membangun Budaya Perdamaian Melalui Kaum Perempuan Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menunjukkan hasil bahwa program Institut Mosintuwu dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan budaya perdamaian di Kabupaten Poso. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Wanda Savela Erfini & Fredian Tonny Nasdian (2021) dengan judul Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 menunjukkan hubungan kuat antara peran modal sosial dengan pemberdayaan perempuan. Hal ini dikarenakan peran modal sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat keberdayaan. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sartika (2021) dengan judul Pengorganisasian Perempuan Dalam Penguatan *Social Capital* (Modal Sosial) Di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa organisasi yang bernama Srikandi PP Gowa dan PD Aisyiyah Gowa, sangat mendukung peningkatan perekonomian di Kabupaten Gowa khususnya pada kaum Perempuan.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus pada pemberdayaan perempuan pedesaan yang dilakukan oleh Institut Mosintuwu dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kemandirian di daerah pasca konflik yaitu Kabupaten Poso, selain itu fokus penelitian dan metode penelitian yang penulis gunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maryati Babutung, Wanda Savela & Fredian Tonny, dan Sartika. Penelitian ini juga menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan teori Pemberdayaan Perempuan oleh Riant Nugroho (2008). Dalam teori tersebut, keberhasilan pemberdayaan perempuan dilihat dari 4 (empat) dimensi yaitu kepemimpinan perempuan, perempuan dalam pembangunan, produktivitas perempuan dan organisasi perempuan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang urgensi modal sosial dalam pemberdayaan perempuan di daerah pasca konflik dan keberhasilan program Institut Mosintuwu dalam memberdayakan perempuan khususnya di wilayah pedesaan di Kabupaten Poso

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif berdasarkan dari fakta-fakta empirik di lokasi penelitian dengan mengumpulkan data kemudian menafsirkannya ke dalam analisis dan perumusan masalah di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan

induktif memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi lapangan dan permasalahan yang ada serta menguraikan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan perempuan pedesaan di daerah pasca konflik Kabupaten Poso.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu *person* (informan) sebagai pendukung dengan melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Kemudian, sumber data sekunder yang dipakai penulis yaitu *paper* (dokumen) yang merupakan sumber data berupa dokumen-dokumen sebagai pendukung sumber data primer. Dokumen yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto kegiatan yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Institut Mosintuwu dalam melakukan pemberdayaan perempuan, dan dokumentasi-dokumentasi lain yang dianggap layak untuk penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas mengenai deskripsi serta analisis data yang diperoleh penulis pada lokasi penelitian di lapangan. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso serta Institut Mosintuwu yang telah di tunjuk. Data tersebut merupakan data utama dalam analisis, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Hasil penelitian tersebut menjelaskan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso serta Institut Mosintuwu dengan program-programnya dalam rangka melakukan pemberdayaan perempuan pedesaan di wilayah pasca konflik Kabupaten Poso.

3.1 Urgensi Modal Sosial Komunitas dalam Pemberdayaan Perempuan Pedesaan melalui Institut Mosintuwu di Daerah Pasca Konflik di Kabupaten Poso

Modal sosial yang meliputi kepercayaan, jaringan serta norma sosial yang tumbuh dalam masyarakat Kabupaten Poso di masa pasca konflik, menjadi dasar dalam proses rekonsiliasi pasca konflik di Kabupaten Poso. Hal ini menjadi modal utama dalam upaya rekonsiliasi pasca konflik di Kabupaten Poso yang dimulai dari lingkup kecil yaitu perempuan, keluarga, desa, hingga mencakup seluruh wilayah Kabupaten Poso.

1. Bentuk Kepercayaan (*trust*) dalam Pemberdayaan Perempuan Pedesaan melalui Institut Mosintuwu

Harapan yang ada dalam masyarakat berkembang menjadi salah satu elemen modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*) sehingga menimbulkan motivasi dan alasan-alasan positif bahwa perempuan juga bisa berdaya melalui proses pemberdayaan perempuan. Urgensi *trust* dan hubungannya dengan pemberdayaan perempuan dilihat dari nilai-nilai yang terbangun di antara alumni Sekolah Perempuan Mosintuwu kemudian saling mendorong dan memotivasi antar mereka dengan rasa kepercayaan yang ada. Keberadaan *trust* dalam proses pemberdayaan perempuan menimbulkan harapan, dan keinginan yang kuat bagi para perempuan bahwa mereka juga bisa berdaya dan mandiri serta mendapatkan hak mereka dari segi ekonomi, sosial dan politik.

2. Bentuk Jaringan Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan Pedesaan melalui Institut Mosintuwu

Jaringan merupakan kemampuan membangun hubungan dan berasosiasi yang menjadi modal dalam membangun kerjasama dan mencapai tujuan bersama. Sekolah Perempuan Mosintuwu menjadi wadah dalam terbangunnya jaringan yang menjadi modal sosial dalam proses pemberdayaan perempuan pedesaan di wilayah pasca konflik di Kabupaten Poso. Hal ini dapat dilihat dari jaringan yang terbangun berasal dari perempuan-perempuan yang berbeda latar belakang baik dari suku, agama

maupun kehidupan sosialnya. Jaringan sosial dan hubungannya dengan pemberdayaan perempuan menumbuhkan rasa solidaritas dan peningkatan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Jaringan sosial yang terbangun mengarah pada terjadinya kerjasama oleh berbagai lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang positif. Jaringan yang terbangun menjadi dasar dalam proses pemberdayaan perempuan pedesaan yang dilakukan oleh Institut Mosintuwu.

3. Norma Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan Pedesaan melalui Institut Mosintuwu

Dalam proses pemberdayaan perempuan oleh Institut Mosintuwu melalui programnya yaitu Sekolah Perempuan, para anggota dan alumninya mematuhi norma kesucilaan salah satunya menghargai satu sama lain baik itu yang berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang sama maupun yang berbeda latar belakang. Masyarakat juga dalam hal ini menaati berbagai norma yang sudah menjadi kebiasaan berdasarkan adat istiadat mereka contohnya seperti saling menghormati, menjunjung tinggi sikap sopan santun, gotong royong dan bekerjasama, serta norma-norma lain yang terbangun dalam masyarakat. Hubungan norma dan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari keterkaitan norma yang ada di masyarakat dan menjembatani serta mempengaruhi proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Institut Mosintuwu

3.2 Pemberdayaan Perempuan Pedesaan di Wilayah Pasca Konflik Kabupaten Poso

Analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan analisis pemberdayaan perempuan untuk mengukur pemberdayaan perempuan di Kabupaten Poso menggunakan indikator pemberdayaan perempuan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2008), yang meliputi : perempuan dalam pembangunan, kepemimpinan perempuan, produktivitas perempuan dan organisasi perempuan.

1. Perempuan dalam Pembangunan

- Dimensi perempuan dalam pembangunan diukur oleh penulis dengan 2 (dua) indikator, yaitu partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.

a. Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan

Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan di Poso dapat dilihat dari jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota legislatif dan memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Poso yaitu berjumlah 6 (enam) orang pada periode 2019-2024. Ketua DPRD Kabupaten Poso periode 2019-2024 adalah seorang perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut, dapat diketahui bahwa perempuan juga menduduki posisi-posisi penting dan strategis dalam proses perumusan kebijakan dalam hal ini menduduki jabatan legislative dan memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Poso.

b. Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Poso khususnya di wilayah pedesaan. Pembangunan wilayah desa memberikan ruang bagi para perempuan yang merupakan alumni Sekolah Perempuan Institut Mosintuwu untuk turut aktif dalam proses pembangunan hingga mengawal proses penyusunan dan pembentukan anggaran desa untuk pembangunan. Peran perempuan dalam penyusunan program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena mereka yang lebih merasakan langsung di lapangan bagaimana permasalahan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat sehingga program pembangunan dapat lebih optimal

dan efektif sesuai dengan kebutuhan warga. Hal ini juga akan meningkatkan efisiensi anggaran karena program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak membuang biaya pada program-program yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

2. Kepemimpinan Perempuan

Dimensi kepemimpinan perempuan diukur oleh penulis dengan 2 (dua) indikator yaitu peningkatan peluang perempuan dalam kepemimpinan dan kemampuan manajerial mengelola organisasi.

a. Peningkatan peluang perempuan dalam kepemimpinan

Keberhasilan modul perempuan dalam politik di Sekolah Perempuan Mosintuwu dapat dilihat dari banyaknya alumni sekolah perempuan yang sudah menjadi pemimpin di desa dan wilayahnya serta turut aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan. Sampai saat ini, terhitung lebih dari 200 dari 523 alumni sekolah perempuan yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Poso sudah menjadi Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, Anggota BPD, Pemimpin Keagamaan, Paralegal Wilayah, Ketua Perhimpunan Kelompok, dan menjadi penggerak kelompok perempuan di masing-masing wilayahnya.

b. Kemampuan manajerial mengelola organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso telah melakukan upaya penguatan organisasi perempuan dengan meningkatkan kemampuan manajerial dan mengelola organisasi. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso ada di masalah anggaran. Keterbatasan anggaran membuat program-program yang ada berjalan tidak sesuai dengan target dan belum terjadi secara menyeluruh. Akan tetapi, kemampuan manajerial organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Poso secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi.

3. Produktivitas Perempuan

Dimensi produktivitas perempuan diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu kemampuan perempuan dalam mengelola usaha dan pengembangan jejaring dan kemitraan di dunia usaha.

a. Kemampuan mengelola usaha

Keberhasilan Sekolah Perempuan Mosintuwu dalam memberdayakan perempuan pedesaan di Kabupaten Poso terbukti dari banyaknya usaha desa dan lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh para alumni sekolah perempuan. Para alumni Sekolah Perempuan Mosintuwu bahkan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitarnya, tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, dan kondisi sosialnya. Misalnya, untuk membuat kerajinan berbahan dasar bambu, sampah plastik dan lain sebagainya, mereka menggunakan sumber daya manusia di lingkungannya yang menjadi langkah awal pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian di desa. Hasil akhirnya adalah, desa menjadi mandiri dan perekonomian meningkat yang berdampak positif juga terhadap peningkatan pendapatan keluarga di desa. Dampaknya, keluarga yang ada di desa akan sejahtera, dan akan terjadi secara berkelanjutan hingga menyeluruh di wilayah Kabupaten Poso.

b. Pengembangan Jejaring dan Kemitraan

Sekolah Perempuan Mosintuwu berhasil memberdayakan para alumninya untuk memproduksi dan membuat usaha sendiri bahkan sampai membuka lapangan pekerjaan lain. Akan tetapi, dalam prosesnya masih menemukan permasalahan lain yaitu kurangnya akses untuk memasarkan produk mereka. Hal ini

disebabkan oleh akses transportasi dan internet yang kurang memadai sehingga tahapan proses hanya sampai di tahap produksi namun belum sampai ke tahap pemasaran produk. Disisi lain, Sekolah Perempuan Mosintuwu menjadi wadah bagi para perempuan yang ada di desa untuk memasarkan produk mereka dengan cara membangun jejaring dan kemitraan dengan desa lainnya atau dengan para alumni yang berasal dari desa yang berbeda.

4. Organisasi Perempuan

Dimensi organisasi perempuan penulis gunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi perempuan dalam hal ini Institut Mosintuwu di Kabupaten Poso. Indikator yang digunakan penulis ada 2 (dua) yaitu, peningkatan peran organisasi perempuan dan penguatan organisasi perempuan.

a. Peningkatan Peran Organisasi Perempuan

Institut Mosintuwu sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Poso yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, menunjukkan keberhasilannya dan memberikan dampak positif bagi para anggotanya. Keberlanjutan dari Sekolah Perempuan Mosintuwu adalah Sekolah Pembaharu Desa, yang merupakan ruang pendidikan kritis bagi kelompok perempuan antar desa dan Pemerintah Desa untuk mempersiapkan, melatih dan membangun solidaritas dalam rangka keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang berkeadilan gender, mewujudkan pembangunan perdamaian dan berkeadilan, bersolidaritas dengan alam, serta menjaga tradisi dan kebudayaan, dan menciptakan ekosistem lingkungan hidup yang selaras. Para perempuan yang ada di desa di Kabupaten Poso lebih berpartisipasi aktif pada setiap sektor baik itu sektor politik, pembangunan, ekonomi, hingga upaya rekonsiliasi di Kabupaten Poso yang merupakan daerah pasca konflik. Hal ini mendorong terjadinya pembangunan dan perdamaian berkelanjutan di Kabupaten Poso.

b. Penguatan Organisasi Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penguatan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Poso dengan berbagai macam cara. Hal ini diharapkan dapat mendorong organisasi perempuan di Kabupaten Poso untuk dapat bekerja dan melaksanakan program-program sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penguatan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Poso bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi secara proposional.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Penulis menemukan bahwa Institut Mosintuwu berhasil menjalankan programnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya pada perempuan di daerah pedesaan pasca konflik Kabupaten Poso dalam rangka peningkatan ekonomi. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryanti Babutung (2018) menunjukkan hasil bahwa program Institut Mosintuwu dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan budaya perdamaian di Kabupaten Poso, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Institut Mosintuwu dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian perempuan pedesaan. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wanda Savela Erfini & Fredian Tonny Nasdian (2021), penelitian ini juga menemukan bahwa modal sosial berperan penting sebagai dasar dalam mewujudkan proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Poso. Temuan penelitian ini menunjukkan hubungan kuat antara peran modal sosial dengan pemberdayaan perempuan. Hal ini dikarenakan peran modal sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat keberdayaan.

Kemudian dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran organisasi masyarakat daerah dalam hal ini Institut Mosintuwu dapat mendorong tingkat perekonomian masyarakat pedesaan khususnya pada perempuan di kabupaten Poso layaknya seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sartika (2021) yang menunjukkan bahwa organisasi yang bernama perempuan sangat mendukung peningkatan perekonomian di daerah khususnya pada kaum Perempuan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diawal mengenai urgensi modal sosial dan dampak pemberdayaan perempuan pedesaan oleh Institut Mosintuwu di Kabupaten Poso, yaitu sebagai berikut.

1. Urgensi modal sosial dalam suatu komunitas berhasil mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi karena terbangun 3 (tiga) dimensi modal sosial didalamnya yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma sosial yang saling berkaitan dan para anggota organisasi mempunyai keinginan yang sama yaitu mencapai tujuan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan. Modal sosial ini juga berperan dalam proses rekonsiliasi pasca konflik di Kabupaten Poso yang menjadi modal utama dalam proses pembangunan perdamaian berkelanjutan, yang mampu menghilangkan rasa curiga dan rasa takut antara masyarakat yang berbeda suku, ras, agama dan status sosial.
2. Keberadaan Institut Mosintuwu sebagai organisasi masyarakat akar rumput, menunjukkan keberhasilannya dengan keberadaan program-programnya salah satunya adalah Sekolah Perempuan Mosintuwu yang berhasil mencetak para alumni perempuan yang akhirnya memberikan dampak positif untuk desa dan wilayahnya, dan berhasil mencetak para perempuan yang berdaya dan mandiri secara ekonomi, sosial dan politik. Selain itu, keberhasilan Institut Mosintuwu dapat dilihat dari program-program mereka dalam melakukan pembangkitan dan pemulihan kegiatan sosial ekonomi serta sebagai agen perdamaian. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pembangunan tidak harus dibebankan hanya pada *stakeholder* pemerintahan. Namun, semua lapisan masyarakat dapat menjadi penggerak dan berperan aktif dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, keberhasilan pemberdayaan perempuan yang merupakan output dari Sekolah Perempuan Mosintuwu membawa dampak positif sebagai suatu resolusi permasalahan yang terjadi di masyarakat pasca konflik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu kurangnya waktu penelitian dan juga biaya sehingga penelitian belum dapat dilakukan secara maksimal. Penulis memiliki keterbatasan untuk turun langsung secara menyeluruh di wilayah pedesaan yang ada dan hanya memiliki sampel di beberapa desa lokus penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso dan Institut Mosintuwu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Babutung, Maryanti. (2018). Peran Institut Mosintuwu Dalam Membangun Budaya Perdamaian Melalui Kaum Perempuan Di Kabupaten Poso. *Media Neliti*, 74-87.
- Gogali, L. (2009). *Konflik Poso: Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Laha, M. S., Sudarman, F., & Nutfa, M. (2021). Kehidupan Pasca Konflik dan Ketegangan Relasi Sosial: Suatu Ancaman Kehancuran Social Capital Trust. *Jurnal Predestination: journal of Society and Culture*, 109-118.
- Nugroho, Riant. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, D. F. (2016). Perempuan dan Dinamika Hubungan Komunikasi Pasca Konflik (Study Kasus LSM Institut Mosintuwu Dalam Membangun Budaya Perdamaian Pasca Konflik Poso). Perpustakaan UNS.
- Sartika. (2021). Pengorganisasian Perempuan Dalam Penguatan Modal Sosial di Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Trijono, L. (2009). Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 48-70

